

	JEMBAD: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis Digital	
	Vol. 02, No. 03, Januari 2026 Hal. 428-435	E-ISSN : 3064-3538 P-ISSN : 3089-235X
	Site : https://ojs.gelcipnus.org/index.php/jemabd	

Pendapat Masyarakat Tentang Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa Di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga

Selvi Wahyu Ningsih¹, Hurian Kamela²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: 044543917@ecampus.ut.ac.id¹, hurian.kamela@ecampus.ut.ac.id²

Article Info	ABSTRAK
Article history: Received Desember 17, 2025 Revised Desember 30, 2025 Accepted Januari 20, 2026 Keywords: Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa Transparansi Keywords: Accountability APBDesa Management Transparency	APBDesa adalah dokumen yang berisi rancangan keuangan desa setiap tahun dan terdiri atas 3 komponen utama meliputi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Desa. Masyarakat sebagai penerima manfaat memiliki hak untuk melihat seberapa jauh pemerintah desa mengelola APBDesa dengan terbuka dan bertanggung jawab. Akan tetapi dalam praktiknya seringkali masih dijumpai rendahnya tingkat partisipasi masyarakat serta minimnya akses terhadap informasi keuangan desa. Maka dari itu, penelitian dilaksanakan untuk memahami bagaimana pendapat masyarakat atas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Dawuhan Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan menganalisis keterkaitannya dengan metode kuantitatif dan teknik analisis regresi linear berganda dengan populasi seluruh warga Desa Dawuhan Kec. Padamara Kab. Purbalingga dengan sampel 60 responden. Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sesuai tabel Uji T, diketahui bahwa nilai t hitung variabel transparansi bernilai 4,094 dan variabel akuntabilitas bernilai 5,166 telah melebihi t tabel sebesar 2,002 dan nilai Sig. <0,001 jauh kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa terhadap pengelolaan APBDesa, transparansi maupun akuntabilitas secara parsial terbukti berpengaruh signifikan dan positif. Hasil nilai R² juga sangat tinggi sebesar 84,6 % hampir mendekati 100% berarti kualitas pengelolaan APBDesa harus fokus pada penguatan transparansi dan akuntabilitas. ABSTRACT <i>The Village Revenue and Expenditure Budget (APBDesa) is a fundamental financial planning document consisting of three primary components: village revenue, expenditures, and financing. As the primary beneficiaries, the community maintains the right to monitor the extent to which village authorities manage these funds with openness and integrity. However, in practice, community participation remains low and access to financial data is often restricted. This study was conducted to evaluate public perception regarding the transparency and accountability of APBDesa management in Dawuhan Village, Padamara District, Purbalingga Regency. Employing a quantitative approach with multiple linear regression analysis, the research sampled 60 respondents from the local population. The T-test results indicated that the transparency variable yielded a t-value of 4.094, while the accountability variable reached 5.166. Both figures exceed the t-table threshold of 2.002, with a significance value (Sig.) of < 0.001, well below the 0.05 margin. These findings demonstrate that transparency and accountability individually exert a significant positive influence on APBDesa management. Furthermore, the R² value of 84.6% suggests that to optimize the quality of village financial management, policy focus must be directed toward strengthening these two pillars.</i> <i>This is an open access article under the CC BY license.</i>



1. PENDAHULUAN

Pada UU No. 6 Tahun 2014, disebutkan bahwa desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. Keberadaan UU tentang Desa tersebut semakin memperluas otonomi dan kewenangan desa dalam mengelola alokasi dana terutama melalui APBDesa yang berisi rancangan keuangan desa tiap tahun dibahas dan disahkan pemerintah desa bersama BPD yang harus dilakukan dengan tanggung jawab dan terbuka agar tercipta tata kelola pemerintah yang baik.

Akuntabilitas dan transparansi termasuk bagian prinsip utama good governance. Transparansi bermakna terbukanya pemerintah dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sehingga masyarakat bisa mengawasi kebijakan atau kinerja pemerintah (Mardiasmo, 2020) [9]. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah supaya bertanggungjawab atas setiap keputusan penggunaan sumber daya (Mahmudi, 2021) [8].

Proses pengelolaan APBDesa seperti perencanaan pelaksanaan penatausahaan pelaporan sampai pertanggungjawaban harus berdasarkan prinsip akuntabel dan transparan (Bastian et al.,2023;Wasistiono & Tahir,2022) [3] [16]. Usaha menjalankan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan APBDesa termasuk cara strategis peningkatan efisiensi belanja dan pencegahan penyalahgunaan anggaran (Edowai et al.,2021) [4].

Hubungan antara transparansi dan akuntabilitas bersifat simbiotik; transparansi menjadi prasyarat bagi terciptanya akuntabilitas (Edowai dkk., 2021) [4]. Secara empiris, penelitian Garung dan Ga (2020) serta Nuraini dkk. (2025) membuktikan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif pada kualitas pengelolaan dana desa [7] [12].

Pendapat atau persepsi masyarakat menjadi indikator kualitatif apakah prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik di lapangan. Elviriani dan Idrus (2023) menegaskan bahwa partisipasi aktif masyarakat hanya akan muncul jika pemerintah desa membuka diri terhadap pengawasan publik [5]. Hal ini diperkuat oleh Saputra dkk. (2022) yang menerangkan jika peran perangkat desa dalam mengomunikasikan kebijakan anggaran sangat menentukan penilaian positif masyarakat pada kinerja pemerintah desa[14].

Pada Desa Dawuhan Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga belum dijumpai transparansi dan akuntabilitas informasi keuangan khususnya APBDesa padahal masyarakat sebagai penerima manfaat berhak melihat apakah pemerintah mengelola APBDesa dengan bertanggung jawab dan terbuka. Akan tetapi pada praktiknya seringkali dijumpai rendahnya partisipasi masyarakat dan minimnya akses informasi keuangan desa. Fokus penelitian spesifik di Desa Dawuhan Kecamatan Padamara perlu diuji secara untuk mengetahui apakah fenomena ini juga terjadi.

Meskipun regulasi mengenai keterbukaan informasi publik telah lama diberlakukan, fenomena di Desa Dawuhan menunjukkan adanya diskoneksi antara ketersediaan dokumen APBDesa dengan aksesibilitas riil yang dirasakan masyarakat. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengukur efektivitas transparansi dan akuntabilitas secara empiris melalui

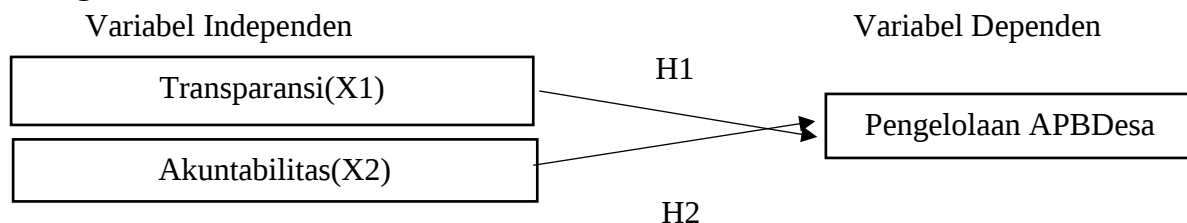
perspektif langsung masyarakat lokal di tengah rendahnya tingkat partisipasi yang masih menjadi kendala klasik di wilayah pedesaan Kabupaten Purbalingga.

Penelitian sebelumnya menyimpulkan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada pengelolaan dana desa (Nuraini et al.,2025) [12]. Namun penelitian Agustiana (2021) [1] menemukan akuntabilitas tidak berpengaruh pada pengelolaan APBDesa. Sebagian studi fokus pada sisi aparat desa atau laporan sedangkan studi spesifik yang berfokus pada pendapat masyarakat sebagai penerima manfaat perlu diperdalam. Penelitian dilakukan untuk melihat pendapat masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDesa Dawuhan Kec. Padamara Kab. Purbalingga dan mengetahui sampai mana penerapan prinsip tersebut dirasakan masyarakat.

2. METODE

Korelasi antar variabel diuji dengan metode kuantitatif menggunakan teknik regresi linear berganda termasuk uji validitas, uji hipotesis, dan uji asumsi klasik. Dengan menyebarkan kuesioner skala likert 1-5 data dikumpulkan hingga diperoleh hasil numerik untuk diuji dengan aplikasi SPSS. Populasinya yaitu seluruh warga Desa Dawuhan Kecamatan Padamara dengan teknik pengambilan sampel probability sampling karena untuk mengetahui bagaimana pendapat dari setiap warga masyarakat di desa tersebut hingga diperoleh sampel 60 responden.

Kerangka Penelitian :



Sumber : Diolah Penulis (2025)

Melihat tinjauan teori dan hasil penelitian terdahulu mayoritas menunjukkan hubungan positif dan signifikan untuk itu hipotesis penelitian dikembangkan sebagai berikut:

(H1): Transparansi diduga berpengaruh positif dan signifikan pada Pengelolaan APBDesa.

(H2): Akuntabilitas diduga berpengaruh positif dan signifikan pada pengelolaan APBDesa.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

No	Variabel	Item	R hitung	R tabel
1	Transparansi(X1)	X1.1	0,807	0,254
		X1.2	0,870	0,254
		X1.3	0,893	0,254
		X1.4	0,868	0,254
		X1.5	0,823	0,254
2	Akuntabilitas(X2)	X2.1	0,878	0,254

3	Pengelolaan APBDesa(Y)	X2.2	0,915	0,254
		X2.3	0,832	0,254
		X2.4	0,894	0,254
		X2.5	0,824	0,254
		Y1	0,864	0,254
		Y2	0,886	0,254
		Y3	0,790	0,254
		Y4	0,807	0,254
		Y5	0,854	0,254

Sumber: Olah data SPSS,2025

Dari tabel tersebut dapat diketahui seluruh pernyataan menunjukkan nilai r hitung yang melebihi r tabel, jadi semua pernyataan sudah terbukti valid.

Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	174,136,951
Most Extreme Differences	Absolute	0,094
	Positive	0,080
	Negative	-0,094
Test Statistic		0,094
Asymp.Sig. (2-tailed) ^c		0,200 ^d

Sumber: Olah data SPSS,2025

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed)nya 0,200 melebihi 0,05 jadi data penelitian telah berdistribusi normal.

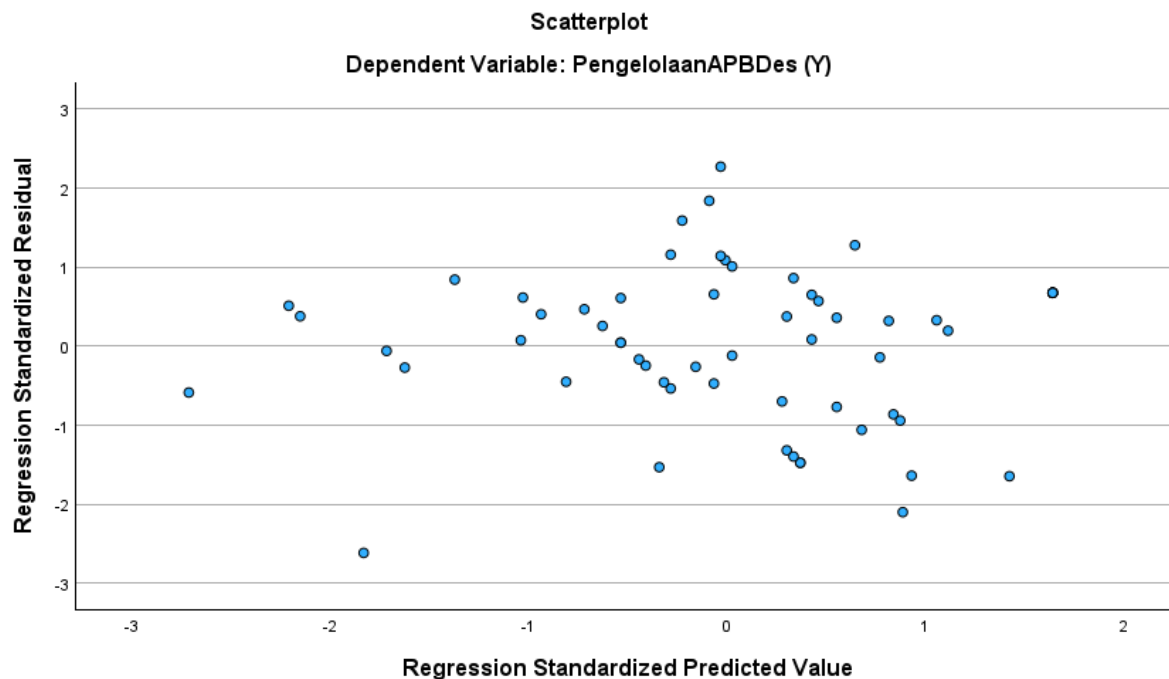
Uji Multikolinearitas Data

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Transparansi (X1)	0,255	3,916
Akuntabilitas (X2)	0,255	3,916

Sumber: Olah data SPSS,2025

Hasil uji variabel X1 dan X2 memperoleh nilai tolerance $0,255 > 0,10$ dan nilai VIF variabel transparansi(X1) dan akuntabilitas(X2) $3,916 < 10$ jadi disimpulkan tidak terdeteksi adanya gejala multikolinearitas pada setiap variabelnya.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 1. Uji Heterokedastisitas

Dengan hasil scatter plot diketahui jika pancaran data telah tersebar acak ada yang dibawah atau diatas nol serta tidak membentuk suatu pola sehingga dinyatakan tidak adanya gejala heterokedastisitas.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,920 ^a	0,846	0,841	1,772

Sumber: Olah data SPSS,2025

Sesuai data tabel tersebut diperoleh nilai R^2 sebesar 0,846 atau berarti bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh sebesar 84,6% terhadap pengelolaan APBdesa hampir mendekati 100 sedangkan 15,4% sisanya dipengaruhi variabel lain.

Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std.Error	Beta		
1	(Constant)	1,601	0,932		1,718	0,091
	Transparansi (X1)	0,375	0,091	0,421	4,094	<,001
	Akuntabilitas (X2)	0,514	0,099	0,531	5,166	<,001

Sumber: Olah data SPSS,2025

Diketahui bahwa constant B bernilai 1,601, Transparansi (X1) bernilai 0,375 dan Akuntabilitas (X2) bernilai 0,514, maka diperoleh persamaan :

$$Y = 1,601 + 0,375 X1 + 0,514 X2 + e$$

Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std.Error	Beta		

1	(Constant)	1,601	0,932		1,718	0,091
	Transparansi (X1)	0,375	0,091	0,421	4,094	<,001
	Akuntabilitas (X2)	0,514	0,099	0,531	5,166	<,001

Sumber: Olah data SPSS,2025

Hasil menunjukan bahwa t hitung variabel X1 bernilai 4,094 dan X2 bernilai 5,166 serta nilai sig < 0,001.

Uji F Simultan

Model	Sum of Squares	Df	Mean Squares	F	Sig
1 Regression	982,490	2	491,245	156,509	<,001 ^b
Residual	178,910	57	3,139		
Total	1,160,400	59			

Sumber: Olah data SPSS,2025

Diketahui bahwa f-hitung bernilai 156,509 dan sig. bernilai < 0,001. Jika dibandingkan dengan F-tabel yaitu 3,16, maka $156,509 > 3,16$ dan sig. < 0,001 jauh kurang dari 0,05. Jadi, secara bersama-sama Transparansi dan Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan pada Pengelolaan APBDesa.

Transparansi dan Pengelolaan APBDesa

Setelah dilakukan pengujian diperoleh hasil sesuai tabel Uji T, diketahui nilai t hitung variabel transparansi (X1) bernilai 4,094 telah melebihi t tabel 2,002 dan nilai Sig. <0,001 jauh kurang dari 0,05 jadi dapat dikatakan bahwa terhadap pengelolaan APBDesa, transparansi secara parsial terbukti berpengaruh signifikan dan positif sehingga hipotesis pertama diterima. Temuan sejalan dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 mengharuskan pemerintah agar transparan [13] dan penelitian (Saputra et al., 2022) transparansi berpengaruh positif pada pengelolaan APBDesa [14].

Transparansi artinya pemerintah menyebarkan informasi APBDesa pada masyarakat dengan akses yang mudah karena ketika warga Desa Dawuhan dapat melihat APBDesa pada balai desa atau papan informasi lain sehingga tercipta transparansi yang tinggi maka akan mendorong kualitas pengelolaan APBDesa lewat pengawasan langsung dari masyarakat (Hadi, 2020) [2].

Transparansi akan memastikan warga mudah mendapatkan petunjuk tentang setiap rencana pelaksanaan dan dampak yang didapatkan (Febrianti & Afiah, 2024) [6]. Pelaksanaan transparansi akan mengurangi perilaku kecurangan atau korupsi kolusi dan nepotisme (Garung & Ga, 2020) [7]. Transparansi bisa menjadi kunci menghindari penyalahgunaan dan sarana menambah kepercayaan publik agar tata kelola keuangan semakin baik (Ngakil & Kaukab 2020;Elviriani & Idrus 2023) [11] [5].

Akuntabilitas dan Pengelolaan APBDesa

Setelah dilakukan pengujian dan diperoleh hasil sesuai tabel Uji T, diketahui nilai t hitung variabel akuntabilitas(X2) bernilai 5,166 telah melebihi t tabel 2,002 dan nilai Sig. <0,001 jauh kurang dari 0,05 jadi dapat dikatakan bahwa terhadap pengelolaan APBDesa, akuntabilitas juga terbukti berpengaruh signifikan dan positif sehingga hipotesis kedua diterima. Dari hasil uji T diketahui akuntabilitas bernilai lebih besar dibandingkan transparansi yang berarti masyarakat Desa Dawuhan berpendapat apabila akuntabilitas berpengaruh lebih signifikan dalam pengelolaan APBDesa.

Penelitian Agustiana (2021) menemukan akuntabilitas berpengaruh negatif pada pengelolaan APBDesa tidak sejalan dengan temuan penelitian ini [1]. Akuntabilitas justru berperan lebih besar daripada transparansi dalam pengelolaan APBDesa jika dilihat berdasarkan hasil uji T. Temuan menggambarkan jika masyarakat berharap pemerintah tidak

terbuka saja namun juga bertanggung jawab pada realisasi atau pelaporan APBDesa. Sejalan dengan Saputra et al., (2022) akuntabilitas memastikan anggaran digunakan sesuai rencana berarti secara tidak langsung menggambarkan kualitas pengelolaan APBDesa tersebut [14].

4. KESIMPULAN

Pada Variabel transparansi dan akuntabilitas terbukti berpengaruh sangat besar pada pengelolaan APBDesa didukung dengan tingginya nilai koefisien determinasi sebesar 84,6% yang hampir mendekati 100%. Dengan semakin tingginya akuntabilitas yang diterapkan maka penyelenggaraan pemerintah juga akan semakin efektif dan efisien. Tingkat kepercayaan masyarakat juga akan meningkat seiring dengan transparansi pemerintah desa dalam melaporkan penggunaan anggaran. Peningkatan ini didorong oleh pengaruh positif dan signifikan transparansi terhadap pengelolaan APBDesa.

Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan tata kelola yang baik dalam manajemen keuangan desa. Tingginya nilai R^2 menunjukkan bahwa masyarakat Desa Dawuhan menilai kualitas pengelolaan APBDesa sangat dipengaruhi dengan prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Maka dari itu upaya peningkatan kualitas pengelolaan APBDesa harus difokuskan pada penguatan mekanisme transparansi dan akuntabilitas.

Penelitian selanjutnya disarankan agar memperbanyak jumlah sampel responden yang mengisi kuesioner, meneliti variabel lain yang mungkin berpengaruh pada pengelolaan APBDesa seperti partisipasi masyarakat, peran BPD, teknologi digital, atau kompetensi SDM dan menggunakan data pendukung lain seperti laporan keuangan atau hasil wawancara dengan aparat desa.

REFERENSI

- [1] V. Agustiana, "Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Desa Gunungbatu (Studi Pada Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi)," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, vol. 1, no. 2, 2021.
- [2] Badiul Hadi, *Buku saku transparansi dan akuntabilitas realisasi APB Desa*. Seknas FITRA dan KOMPAK, 2020.
- [3] I. Bastian, H. Manurung, and R. M. Dhewi, *Akuntansi kecamatan dan desa*. Universitas Terbuka, 2023.
- [4] M. Edowai, H. Abubakar, and M. Said, *Akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan daerah*. Pusaka Almaida, 2021.
- [5] M. R. T. Elviriani and M. Idrus, "Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Apbdes) di Desa Patanyamang Kecamatan Camba Kabupaten Maros," *Economics and Digital Business Review*, vol. 4, no. 2, pp. 217–224, 2023.
- [6] A. M. Febrianti and M. S. N. Afiah, "Akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)," *Jurnal Akuntansi*, 2024.
- [7] C. Y. Garung and L. L. Ga, "Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pencapaian good governance pada Desa Manulea," *Jurnal Ilmiah*, 2020.
- [8] Mahmudi, *Akuntansi Sektor Publik*. UPP STIM YKPN, 2021.
- [9] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi, 2020.

- [10] L. W. Ningsih and L. Yuliana, "Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes 2024 di Desa Sowanlor, Jepara," *MASMAN: Master Manajemen*, vol. 3, no. 2, pp. 84–97, 2025.
- [11] H. Ngakil and M. Kaukab, "Analisis Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)," *Journal Of Economic, Management, Accounting And Technology*, vol. 3, no. 2, pp. 92–107, 2020.
- [12] N. Nuraini, H. Blongkod, and A. R. Wuryandini, "Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa," *Jurnal Akuntansi*, 2025.
- [13] *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- [14] R. Saputra, D. Darmanto, and S. Ningsih, "Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan peran perangkat desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Kecamatan Juwiring," *Jurnal Ekonomi*, 2022.
- [15] M. Sari, S. Hanum, and F. Arlita, *Monograf good governance* dalam pengelolaan dana desa. UMSU Press, 2022.
- [16] S. Wasistiono and I. Tahir, *Administrasi pemerintahan desa*, Ed. 4. Universitas Terbuka, 2022.
- [17] Yusri and Chairina, *Tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana desa*, 2023.